

Nama : Diah Rachmawati Syukri

NPM : 2523031003

UMKM Lokal Tersingkir oleh Ekonomi Digital

Di sebuah daerah pesisir, UMKM kerajinan lokal mulai menurun karena tidak mampu bersaing dengan produk digital/online dan pemasaran berbasis e-commerce. Pemerintah daerah ingin melakukan intervensi, namun program yang ada belum menyentuh akar masalah seperti literasi digital dan strategi pemasaran.

1. Analisis faktor sosial ekonomi yang menyebabkan UMKM tidak berkembang.

Jawaban: Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Dalam konteks UMKM kerajinan lokal di daerah pesisir, persoalan utama bukan hanya kualitas produk yang kalah bersaing, tetapi juga ketidaksiapan pelaku usaha menghadapi transformasi digital. Menurut saya, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan UMKM tidak berkembang berasal dari rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, minimnya akses teknologi, dan lemahnya kemampuan pemasaran. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan penjualan konvensional, sementara perilaku konsumen telah berpindah ke platform digital dan *e-commerce*. Selain itu, faktor pendidikan dan usia juga memengaruhi kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Penelitian tentang literasi digital UMKM menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan teknologi informasi sangat menentukan daya saing usaha di era digital (Tamyiz, dkk., 2025)

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal berupa dominasi marketplace besar yang memiliki sistem promosi, algoritma pemasaran, dan jaringan distribusi yang jauh lebih kuat dibandingkan UMKM lokal. Akibatnya, produk lokal sulit muncul dalam persaingan harga maupun visibilitas digital. Saya berpendapat bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan ketimpangan infrastruktur ekonomi digital antara pelaku usaha besar dan kecil. Penelitian mengenai transformasi digital UMKM menunjukkan bahwa keterbatasan akses infrastruktur, lemahnya kemampuan branding, dan rendahnya pemanfaatan *e-commerce* menjadi hambatan utama perkembangan UMKM di Indonesia (Silviawati, dkk., 2025).

2. Kritisi kebijakan pemerintah daerah dari perspektif ekonomi dan kewirausahaan sosial.

Jawaban: Dari perspektif ekonomi dan kewirausahaan sosial, kebijakan pemerintah daerah dalam kasus ini dapat dikritisi karena cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan. Program bantuan sering hanya berupa pelatihan singkat atau bantuan modal tanpa pendampingan berkelanjutan. Padahal, kewirausahaan sosial menekankan pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan menciptakan dampak sosial jangka panjang. Menurut saya, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator transformasi digital UMKM melalui pelatihan intensif, inkubasi bisnis, akses pemasaran digital, dan kolaborasi dengan platform teknologi. Jika program hanya bersifat seremonial tanpa evaluasi dampak, maka UMKM akan tetap tertinggal. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa literasi digital dan pemanfaatan *e-commerce* memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dan kinerja UMKM, sehingga kebijakan yang tidak fokus pada aspek tersebut menjadi kurang efektif.

Saya juga melihat bahwa pemerintah daerah perlu membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih adil. Misalnya dengan membuat *marketplace* lokal berbasis komunitas, memberikan subsidi promosi digital, atau menjalin kerja sama dengan platform *e-commerce* nasional agar produk UMKM lokal mendapat prioritas promosi. Beberapa diskusi publik menunjukkan bahwa UMKM juga menghadapi persoalan biaya admin platform, ongkos kirim, dan persaingan algoritma *marketplace* yang berat bagi usaha kecil. Karena itu, intervensi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi juga perlindungan ekonomi bagi pelaku usaha kecil agar mampu bertahan dalam kompetisi digital.

3. Usulkan strategi pembelajaran IPS yang dapat memberdayakan siswa untuk mendukung UMKM melalui literasi digital dan kewirausahaan.

Jawaban: Dalam bidang pendidikan IPS, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk memberdayakan siswa adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek sosial dan kewirausahaan digital. Menurut saya, siswa tidak cukup hanya mempelajari teori ekonomi, tetapi perlu dilibatkan langsung dalam pendampingan UMKM lokal. Guru IPS dapat mengajak siswa membuat konten promosi digital, membantu pembuatan akun marketplace, melakukan fotografi produk, hingga membuat strategi branding sederhana bagi UMKM di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, siswa belajar memahami persoalan sosial ekonomi nyata sekaligus memiliki keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan kewirausahaan.

Strategi lain yang relevan adalah *project based learning* dan *collaborative learning*. Misalnya siswa diminta membuat kampanye “Bangga Produk Lokal” melalui media sosial sekolah atau melakukan riset sederhana tentang perilaku konsumen digital di daerah mereka. Pendekatan ini penting karena IPS tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepedulian sosial dan kemampuan memecahkan masalah masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, pembelajaran IPS dapat menjadi sarana membangun kesadaran bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal, bukan justru mematikan UMKM tradisional.

REFERENSI

Silviawati, S., Wibawa, E. S., Wardani, N. A., Wahyuning, S., & Noviana, I. (2025). Peran E-Commerce dalam Transformasi Digital UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 3(4), 159–175. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i4.3551>

Tamyiz, U. M. H., Munir, Furqon, C., dan Dirgantari, P. D. (2025). Literasi Digital di UMKM: Tinjauan Sistematis dan Pengembangan Kerangka Teoretis Terintegrasi Menggunakan Metode PRISMA. *Jurnal Algoritma*, 22 (2), 412–421. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2308>